

ABSTRAK

Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan membina narapidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Dalam proses pembinaan, narapidana memiliki hak untuk mengikuti program kerja serta memperoleh premi sebagai bentuk kompensasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif, premi tersebut seharusnya diberikan secara lancar, teratur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemberian premi kepada narapidana belum sepenuhnya optimal. Terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan, yang berdampak pada efektivitas program pembinaan kerja sebagai sarana reintegrasi sosial narapidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, mengidentifikasi kendala-kendala yang memengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, dan mengkaji upaya-upaya untuk mengatasi problematika terkait pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

Penulis menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori pemenuhan hak atas premi sebagai landasan analisis. Teori keadilan digunakan untuk menilai aspek keadilan dalam pemenuhan hak atas premi bagi narapidana. Teori perlindungan hukum digunakan untuk memahami bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak narapidana melalui lembaga pemasyarakatan terkait. Teori pemenuhan hak atas premi digunakan untuk menganalisis implementasi hak narapidana atas kompensasi kerja dalam bentuk premi. Penelitian ini menjadikan UUD 1945, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai dasar hukum dalam mengkaji pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

Permasalahan dalam penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan pemenuhan hak atas premi di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung belum berjalan optimal karena premi yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dinilai terlalu kecil dibandingkan dengan usaha serta hasil kerja narapidana dalam program pembinaan. Kendala seperti keterlambatan pembayaran, mitra usaha yang tidak konsisten, serta keterbatasan sarana dan sumber daya manusia turut memengaruhi efektivitas pemenuhan hak atas premi. Untuk mengatasinya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung melakukan evaluasi rutin, meningkatkan kerja sama, komunikasi, dan anggaran pelatihan, serta mengembangkan variasi program guna mendukung kesejahteraan narapidana dan keberhasilan pembinaan kerja.